

BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN
Makassar
2024

CaLK
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir
31 Desember 2024

Jl .Bandara Baru,
Bandar Udara Sultan Hasanuddin,
Makassar

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2024 Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggung jawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar.

Makassar, 07 Mei 2025
Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan
Makassar

dr. Achmad Farchanny Tri Adryanto, MKM
NIP. 196902192002121003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	5
Daftar Isi	6
Pernyataan Tanggung Jawab	7
Ringkasan	8
I. Laporan Realisasi Anggaran	8
II. Neraca	8
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	14
A. Penjelasan Umum	14
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	26
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	31
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	38
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	43
F. Pengungkapan Penting Lainnya	46
VI. Lampiran dan Daftar	47

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2024 Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Makassar, 07 Januari 2025
Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan
Makassar

dr. Achmad Farchanny Tri Adryanto, MKM
NIP. 196902192002121003

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2024 Balai Besar Kekarantina Kesehatan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Realisasi Pendapatan Negara pada Semester II TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 5.770.668.051,- atau mencapai 302 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.1.913.125.000,- Realisasi Belanja Negara hingga sem II TA 2024 adalah sebesar Rp.30.222.085.614,- Terdiri atas belanja pegawai: Rp. 19.999.910.417,-; belanja barang : Rp. 9.923.294.352,- dan belanja modal : Rp. 298.880.845,- Realisasi belanja sepanjang tahun 2024 mencapai 100% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 30.367.500.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas hingga 31 Desember tahun 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp.40.639.709.862,- yang terdiri dari: Aset Lancar senilai Rp.706.191.556,- yakni Persediaan senilai Rp.706.191.556,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.39.925.829.908,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.7.688.398,-. Pada sisi Passiva terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek senilai Rp.34.641.965,- dan Ekuitas disajikan sebesar Rp.40.605.067.897,- sehingga Jumlah Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp. 40.639.709.862,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-

LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.5.770.147.218,- sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp.35.593.173.079,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp.29.823.025.861,-). Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa disajikan sebesar Rp.(0,-) dan Pos Luar Biasa sebesar Rp. 0,- sehingga pada semester II Tahun Anggaran 2024 diperoleh Defisit LO sebesar (Rp.29.823.025.861,-)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas pada tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun pelaporan pada periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pada Semester II TA 2024 Laporan Ekuitas Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar disajikan sebagai berikut: Ekuitas awal pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp.43.266.495.315,-. Defisit LO sebesar (Rp.29.823.025.861,-). Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas sebesar Rp. (2.314.286,-) terdiri dari : Koreksi atas Reklas sebesar Rp. 2.314.286,-; Koreksi nilai aset non revaluasi (Rp.75.670.251,-). Transaksi antar entitas senilai Rp.27.234.954.408,-) terdiri atas : Ditagihkan Ke Entitas Lain Rp.30.222.085.614,- ; Diterima dari Entitas Lain (Rp.5.770.668.051,-); Transfer Masuk Rp.2.635.569.127,-, Pengesahan Hibah Langsung Rp.147.967.718,- dan Kenaikan/Penurunan ekuitas sebesar (Rp.2.661.427.418,-) sehingga Ekuitas Akhir entitas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.40.605.067.897,-

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran pada Semester II tahun 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN SEMESTER I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 2023

Tabel I. Laporan Realisasi Anggaran (Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024		% thd Angg	Tahun 2023		% thd Angg
		ANGGARAN	REALISASI		Anggaran	REALISASI	
PENDAPATAN							
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	1.913.125.000	5.770.668.051	301,64	2.411.510.000	2.643.225.254	110
JUMLAH PENDAPATAN		1.913.125.000	5.770.668.051	301,64	2.411.510.000	2.643.225.254	110
BELANJA							
Belanja Pegawai	B.2	20.010.013.000	19.999.910.417	99,95	15.989.457.000	13.108.741.751	82
Belanja Barang	B.3	10.052.337.000	9.923.294.352	98,72	14.378.747.000	7.546.465.499	52
Belanja Modal	B.4	305.150.000	298.880.845	-	2.099.852.000	928.462.475	-
JUMLAH BELANJA		30.367.500.000	30.222.085.614	99,52	32.468.056.000	21.583.669.725	66,48

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR NERACA PER 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel II. Neraca Per 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-24	2023	Kenaikan (Penurunan)	
ASET				Jumlah	%
ASET LANCAR					
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-	-	
Belanja Dibayar Dimuka		-	6.838.356	(6.838.356)	
Persediaan	C.2	706.191.556	1.540.102.024	(833.910.468)	-54,15%
Jumlah Aset Lancar		706.191.556	1.546.940.380	(840.748.824)	-54,35%
ASET TETAP					
Tanah	C.3	18.083.526.373	17.935.558.655	147.967.718	0
Peralatan dan Mesin	C.4	31.879.479.345	31.357.430.945	522.048.400	1,66%
Gedung dan Bangunan	C.5	21.921.105.341	21.736.960.396	184.144.945	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.6	127.816.000	127.816.000	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.7	(32.086.097.151)	(29.416.748.187)	(2.669.348.964)	9,07%
Jumlah Aset Tetap		39.925.829.908	41.741.017.809	(1.815.187.901)	-4,35%
ASET LAINNYA					
Aset Tidak Berwujud	C.8	-	1.400.000	-	-
Aset Lain-Lain	C.9	4.114.861.402	5.208.009.357	(1.093.147.955)	-20,99%
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.10	(4.107.173.004)	(5.190.117.489)	1.082.944.485	-20,87%
Jumlah Aset Lainnya		7.688.398	19.291.868	(11.603.470)	-60,15%
JUMLAH ASET		40.639.709.862	43.307.250.057	(2.667.540.195)	-6,16%
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang Pada Pihak Ketiga	C.11	31.516.965	38.150.575	(6.633.610)	(0,17)
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.12	-	-	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.13	3.125.000	2.604.167	520.833	-
Uang Muka dari KPPN	C.14	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		34.641.965	40.754.742	(6.112.777)	-15,00%
JUMLAH KEWAJIBAN		34.641.965	40.754.742	(6.112.777)	-15,00%
EKUITAS					
Ekuitas	C.15	40.605.067.897	43.266.495.315	(2.661.427.418)	-6,15%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		40.639.709.862	43.307.250.057	(2.667.540.195)	-6,16%

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024

Tabel III. Laporan Operasional Per 31 Desember 2024 dan 2023 (Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-24	31-Dec-23	Kenaikan (Penurunan)	
				Jumlah	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN					
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	5.770.147.218	2.961.277.116	2.808.870.102	94,85%
JUMLAH PENDAPATAN		5.770.147.218	2.961.277.116	2.808.870.102	94,85%
BEBAN				-	0,00%
Beban Pegawai	D.2	19.998.650.417	17.929.528.370	2.069.122.047	11,54%
Beban Persediaan	D.3	3.460.684.428	3.903.332.215	(442.647.787)	-11,34%
Beban Barang dan Jasa	D.4	4.942.514.075	5.096.524.404	(154.010.329)	-3,02%
Beban Pemeliharaan	D.5	1.318.767.988	1.464.701.678	(145.933.690)	-9,96%
Beban Perjalanan Dinas	D.6	3.190.060.232	6.175.913.552	(2.985.853.320)	-48,35%
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	2.682.495.939	4.392.412.123	(1.709.916.184)	-38,93%
Beban Penyisihan Piutang			-	-	0,00%
JUMLAH BEBAN		35.593.173.079	38.962.412.342	(3.369.239.263)	-8,65%
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(29.823.025.861)	(36.001.135.226)	6.178.109.365	-17,16%
KEGIATAN NON OPERASIONAL				-	0,00%
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.9	-	195.259.999	(195.259.999)	0,00%
Beban Kerugian Pelepasan Aset	D.10	-	-	-	0,00%
<i>Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar</i>		-	195.259.999	(195.259.999)	0,00%
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11	-	337.315.852	(337.315.852)	0,00%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	D.12	-	-	-	0,00%
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Tahun anggaran yang lalu	D.13	-	-	-	0,00%
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	D.14	-	-	-	0,00%
<i>Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</i>		-	532.575.851	(532.575.851)	-100,00%
<i>Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</i>		-	-	-	0,00%
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.15	-	-	-	#DIV/0!
Beban Persediaan Rusak/Usang	D.16	-	-	-	
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		-	532.575.851	(532.575.851)	-100,00%
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		-	-	-	0,00%
				-	0,00%
SURPLUS/DEFISIT LO	D.11	(29.823.025.861)	(35.468.559.375)	5.645.533.514	-15,92%

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 2023

Tabel IV. Laporan Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-24	31-Dec-23	Kenaikan (Penurunan)	
				Jumlah	%
EKUITAS AWAL	E.1	43.266.495.315	44.646.372.621	(1.379.877.306)	-3,09%
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(29.823.025.861)	(35.468.559.375)	5.645.533.514	-15,92%
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		(73.355.965)	126.291.747	(199.647.712)	-158,08%
Koreksi atas Reklasifikasi	E.3	2.314.286	-		0,00%
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.4	-			
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.5	(75.670.251)	126.291.747		
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.3	27.234.954.408	33.962.390.322	(6.727.435.914)	-19,81%
Ditagihkan Ke entitas Lain	E.3.1	30.222.085.614	33.141.971.689	(2.919.886.075)	-8,81%
Diterima dari Entitas Lain	E.3.2	(5.770.668.051)	(3.494.194.217)	(2.276.473.834)	65,15%
Transfer Keluar		-	-	-	#DIV/0!
Transfer Masuk	E.3.3	2.635.569.127	4.314.612.850	(1.679.043.723)	0,00%
Pengesahan Hibah Langsung	E.3.4	147.967.718	-	147.967.718	0,00%
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.4	(2.661.427.418)	(1.379.877.306)	(1.281.550.112)	92,87%
EKUITAS AKHIR	E.5	40.605.067.897	43.266.495.315	(2.661.427.418)	-6,15%

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Besar

Kekarantinaan Kesehatan Makassar

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Kementerian Kesehatan. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 356/MENKES/PER/IV/2008 Jo Permenkes Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, disebutkan bahwa KKP terdiri dari Bagian Tata Usaha, Bidang Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi, Bidang Pengendalian Resiko Lingkungan, Bidang Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah, Wilayah Kerja, Kelompok Fungsional dan Instalasi.

Wilayah Kewenangan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar (BBKK Makassar) terdiri dari Induk di Bandara Sutan Hasanuddin dan 9 (sembilan) wilayah kerja yang tersebar di 2 (Dua) Provinsi yaitu Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Wilker yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari Pelabuhan Internasional Soekarno Hatta, Pelabuhan Khusus Biringkassi, Pelabuhan Pare-Pare, Pelabuhan Awerange, Pelabuhan Bajo'E, Pelabuhan Palopo, dan Pelabuhan Malili. Wilayah Kerja di Provinsi Sulawesi Barat yaitu Pelabuhan Belangbelang dan Bandara Tampapadang.

Entitas berkedudukan di Jalan Bandara Baru, Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar.

Tugas Pokok Dan Fungsi

1. Tugas Pokok.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar mempunyai tugas pokok pencegahan masuk dan

keluarnya penyakit menular, penyakit potensial wabah, pengamanan terhadap penyakit yang muncul kembali, survailans epidemiologi, kekarantinaaan, pengawasan OMKABA, pelayanan kesehatan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara dan lintas batas darat negara.

2. Fungsi

- a. Pelaksanaan kekarantinaaan
- b. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan
- c. Pelaksanaan pengendalian resiko lingkungan di bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara
- d. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potesial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali
- e. Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi dan kimia
- f. Pelasanaan sentra/simpul jejaring survailans epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional dan Internasional
- g. Pelaksanaan fasilitas dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan KLB dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk
- h. Pelaksanaan fasilitas dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara
- i. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan OMKABA export dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKABA import
- j. Pelaksanaan Pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya

- k. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara
- l. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara
- m. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di bandara
- n. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian resiko lingkungan, dan survailans keshatan pelabuhan
- o. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara
- p. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggan KKP.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar berkomitmen dengan visi ***“Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar yang Tangguh dan Prima dalam Cegah Tangkal Faktor Resiko untuk Mewujudkan Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan di Pintu Gerbang Negara”***

Untuk terciptanya Visi tersebut dirumuskan misi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar, antara lain :

- a. Melindungi kesehatan masyarakat di wilayah kerja pelabuhan dan Bandara melalui pelaksanaan cegah tangkal penyakit Karantina, penyakit menular dan PHEIC
- b. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja pelabuhan dan bandara melalui pemberdayaan masyarakat termasuk swasta dan masyarakat madani
- c. Mencegah timbulnya penyakit melalui penyelenggaraan pengendalian resiko lingkungan

- d. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengendalian dan pencegahan penyakit di wilayah kerja BBKK Makassar.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2024 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau

setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan

dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan

- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa

pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5)Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban

secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel V: Tabel Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin

berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara

berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel VI. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas

dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel VII. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN
REALISASI ANGGARAN**

Dalam periode Semester II Tahun 2024 Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar telah merevisi sebanyak 3 (tiga) kali Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal.

*Realisasi
Pendapatan
Rp.5.770.668.
051-*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 5.770.668.051,- atau mencapai 302 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.1.913.125.000,-. Pendapatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar terdiri dari:

- 1. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar Rp.6.250.000,-
- 2. Jasa Layanan Fasilitas Kesehatan Rp. 372.615.000,-
- 3. Jasa Karantina Kesehatan sebesar Rp.1.242.630.000,-
- 4. Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan sebesar Rp. 4.143.345.000,-

*Tabel VIII
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Triwulan III Tahun 2024*

AKUN	Uraian	31-Dec-24		
		Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan bangunan	-	6.250.000	
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	43.035.000	372.615.000	865,84
425314	Pendapatan Jasa Karantina Kesehatn	1.571.590.000	1.242.630.000	79,07
425315	Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan	298.500.000	4.143.345.000	1.388,06

Realisasi Pendapatan pada sem.II TA 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada TA 2023 yakni sebesar 57 %, Hal ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan pelayanan vaksin Meningitis Jemaah Umroh akibat diwajibkannya vaksin meningitis bagi Jemaah umroh oleh pemerintah Arab Saudi.

Realisasi

Belanja Negara
Rp.30.222.085.614,-

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada semester II TA 2024 adalah sebesar Rp.30.222.085.614,- atau 99.52% dari anggaran belanja sebesar Rp. 30.367.500.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada sem II TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel IX Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester II TA 2024

Uraian	Semester II (31 Desember 2024)		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	20.010.013.000	19.999.910.417	99,95%
Belanja Barang	10.052.337.000	9.923.294.352	98,72%
Belanja Modal	305.150.000	298.880.845	97,95%
Jumlah	30.367.500.000	30.222.085.614	99,52%

Prosentase Realisasi Belanja pada semester II TA 2024 mengalami penurunan sebesar 8.81% dibandingkan realisasi belanja pada periode yang sama pada tahun

sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh penurunan belanja modal oada TA 2024.

Tabel X :Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI Belanja TA 2024	REALISASI Belanja TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	19.999.910.417	17.928.268.370	11,56
Belanja Barang	9.923.294.352	13.179.602.185	(24,71)
Belanja Modal	298.880.845	2.034.101.134	(85,31)
Jumlah	30.222.085.614	33.141.971.689	(8,81)

Belanja
Pegawai Rp.
19.999.910.41
7,-

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai pada TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.19.999.910.417,- dan Rp.17.928.268.370,- . Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi Belanja Pegawai pada triwulan III TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 12.13 persen dibandingkan pada periode yang sama pada TA 2023, hal ini disebabkan oleh bertambahnya tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja pegawai yang beralih ke jenjang jabatan fungsional tertentu serta kenaikan gaji berkala pegawai.

Belanja
Barang
Rp.9.923.294.3
52,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 9.923.294.352,- dan Rp.13.179.602.185,-. Realisasi Belanja Barang pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar 4% dibandingkan

realisasi Belanja Barang pada periode yang sama di tahun 2023. Hal ini antara lain disebabkan oleh berkurangnya belanja keperluan perkantoran dalam rangka menunjang kegiatan operasional dan non operasional kantor sepanjang tahun 2024.

Belanja Modal
Rp.298.880.845
,-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal pada TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.298.880.845,- dan Rp.2.034.101.134,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal pada semester II tahun 2024 adalah berupa belanja modal peralatan dan mesin. Uraian mengenai belanja modal ini akan ungkapkan pada penjelasan atas pos-pos neraca pada belanja aset peralatan dan mesin.

B.6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar pada Desember 2024 adalah 99.88 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel XI. Rincian Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran Semester II 2024

NO	Uraian	Nilai
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi Hal III DIPA	15
3	Penyerapan Anggaran	19,88
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP/TUP	10
7	Capaian Output	25
Total Nilai		99,88

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas Di
Bendahara
Pengeluaran
Rp.0,-

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara adalah sejumlah uang tunai TUP/GUP dalam penguasaan Bendahara Pengeluaran yang akan

digunakan sebagai operasional dan mendukung kegiatan perkantoran.

Persediaan
Rp.706.191.556
,-

C.2. Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 706.191.556,- dan Rp.1.540.102.024,-. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan pada Balai Besar Kekarantina Kesehatan Makassar diperoleh dari Belanja Rutin.

Tabel XIII. Rincian Persediaan
per 31 Desember 2024 dan 2023

Jenis	Jenis	Sem. II TH 2024
117111	Barang Konsumsi	379.944.164
117113	Barang untuk Pemeliharaan	2.264.750
117131	Bahan Baku	-
117199	Persediaan Lainnya	323.982.642
Jumlah		706.191.556

Persediaan pada semester II tahun 2024 dalam kondisi baik.

Tanah
Rp.18.083.526
.373,-

C.3. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Balai Besar Kekarantina Kesehatan Makassar per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.18.083.526.373,- dan Rp.17.935.558.655,-. Penambahan nilai tanah senilai Rp.147.967.718,- adalah hibah tanah kantor wilker pasangkayu yang telah mendapatkan pengesahan hibah dari KPPN Makassar II pada bulan Juli 2024. Rincian saldo Tanah per 30 September 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel XIV. Rincian Tanah Per 30 September 2024

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	120	Tanah Rumah dinas Parepare	86.904.000
2	204	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1.794.189.000
3	12.160	Tanah Wilker Bandara Tamba Padang Mamuju - Sulawesi Barat	388.500.000
4	4.000	Tanah Kantor Induk	8.942.400.000
5	1.230	Tanah Bangunan Kantor Parepare	1.321.943.000
6	1.360	Tanah Bangunan Wilker Bajoe	1.242.496.000
7	2.531	Tanah Bangunan Wilker Palopo	2.405.343.000
8	999	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	634.941.525
9	1.200	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Wilker Pasangkayu)	147.967.718
10	800	Tanah Wilker Awerange	797.429.630
11	1.000	Tanah Wilker Bira	321.412.500
JUMLAH			18.083.526.373

Peralatan dan
Mesin
Rp.31.879.479
.345,-

C.4. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp. 31.879.479.345,- dan Rp.31.357.430.945,-. Penambahan belanja modal Peralatan dan Mesin sebesar 4.41% diperoleh dari belanja modal BBKK Makassar selama Tahun 2024, berupa :

- 1. Sepeda Motor Listrik Rp. 16.200.000,-
- 2. Kursi Roda Rp.19.000.000,-
- 3. Mesin Pompa Air PMK Rp.2.258.000,-
- 4. Timbangan Meja 5 Kg Rp. 1.820.000,-
- 5. Cold Storage Rp. 4.843.000,-
- 6. Senter Rp. 1.330.000,-
- 7. Jangka Rp. 2.350.000,-
- 8. Stainless Steel Ware Set Rp. 1.043.000,-
- 9. Weight Scale Capacity 120 Kg Rp. 2.500.000,-
- 10. Alat Kesehatan Umum Lainnya Rp. 5.048.400,-
- 11. Refractometer Rp.1.590.000,-
- 12. Alat Laboratorium Umumnya Rp. 1.750.000,-
- 13. Kompor Gas Rp. 430.000,-
- 14. Alat Khusus Surta Rp. 13.455.000,-
- 15. Laptop Rp. 87.500.000,-

- 16. Alat Kesehatan Umum Lainnya Rp.2.004.000,-
- 17. Printer Rp. 22.000.000,-

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo awal Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	31.357.430.945
Mutasi tambah:	
Pembelian	238.060.900
Reklas aset lainnya ke aset tetap	0
Transfer Masuk	0
Mutasi kurang:	
Penghapusan Aset	0
Reklas aset Tetap ke Gedung dan Bangunan	61.662.500
Saldo per 31 Desember 2024	31.533.829.345
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-26.975.506.351
Nilai Buku per 31 Desember 2024	4.558.322.994

Gedung dan Bangunan
Rp.21.921.105.341

C.5. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 21.921.105.341,- dan Rp.21.736.960.396,-. Penambahan Gedung dan Bangunan pada Tahun 2024 sebesar Rp. 184.144.945,- diperoleh dari pembangunan koridor mushalla dan toilet pos security senilai Rp. 117.981.915,-, biaya konsultan dan pengawas sebesar Rp.4.500.530, serta reklas masuk dari peralatan dan mesin berupa papan nama visual senilai Rp.61.662.500,-

C.6. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp. 127.816.000,-

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.127.816.000,-. Tidak terjadi kenaikan/penurunan dikarenakan tidak ada transaksi pembelian maupun penghapusan pada periode tersebut.

Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
(Rp.32.086.097.151,-)

C.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp.32.086.097.151,-) dan (Rp.29.416.748.187,-). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel XVI. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Semester II TA 2024

No	Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2024	Akumulasi Penyusutan sd. 31 Desember 2023	Naik/Turun (%)
1	Peralatan dan Mesin	27.754.019.932	25.551.550.039	1,09
2	Gedung dan Bangunan	4.227.292.469	3.765.966.698	1,12
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	104.784.750	99.231.450	1,06
Akumulasi Penyusutan		32.086.097.151	29.416.748.187	1,09

Aset Tak
Berwujud Rp.
0,-

C.8. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp.0,- dan Rp. 1.400.000,- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Balai Besar Kekarantinaan Makassar berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Aset Lain-lain
Rp.4.114.861.402,-

C.9. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.4.114.861.402,- dan Rp.5.208.009.357,- Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

Akumulasi
Penyusutan
Dan
Amortisasi
Aset Lainnya
(Rp.4.107.173.
004,-)

C.10. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp.4.107.173.004,-) (Rp.5.190.117.489,-). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel XVIII. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2024

Aset LAINNYA	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi
Aset Tak Berwujud	1.400.000	1.400.000
Aset Lain-lain	4.113.461.402	4.105.773.004
Jumlah	4.114.861.402	4.107.173.004

Amortisasi Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp.
31.516.965,-

C.11. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga pada semester II tahun 2024 tercatat sebesar Rp. 31.516.965,- merupakan belanja utilitas (lisrik dan PDAM) pada bulan Desember yang akan dibayarkan pada bulan Januari 2025.

Hutang yang
belum
ditagihkan
Rp.0,-

C. 12. Hutang Yang Belum Ditagihkan

Hutang yang belum ditagihkan sebesar Rp. 0,- adalah belanja yang menggunakan kartu kredit pemerintah atau Uang Persediaan Kantor namun belum dilakukan input BAST hingga akhir periode palaporan.

Uang Muka
dari KPPN
Rp.0-

C.13. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN merupakan jumlah kas di bendahara pengeluaran yang berasal dari uang persediaan yang dipergunakan untuk belanja operasional kantor. Uang Mka dari KPPN pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.0,-

Pendapatan
Diterima
Dimuka
Rp.3.125.000,-

C.14 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan di terima dimuka adalah pendapatan yang diterima pada tahun berjalan namun manfaatnya akan di terima pada tahun berikutnya. Pendapatan diterima dimuka pada semester II 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.3.125.000,- dan Rp.2.604.167 adalah sewa kantin KPN Arwana pada tahun 2025 selama setahun. Sewa dimulai pada bulan Juli 2024 hingga Juli 2025.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan
Operasional
Rp.5.770.147.
218,-

D.1 Pendapatan Operasional

Jumlah Pendapatan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.35.770.147.218,- dan Rp.2.961.277.116,-. Adapun rincian pendapatan operasional pada semester II tahun 2024 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel XIX.

Rincian Pendapatan Operasional Per 30 September 2024

AKUN	URAIAN	31-Dec-24	31-Dec-23	NAIK (TURUN) %
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	5.729.167	5.908.750,	96,96%
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	372.615.000	204.355.000,	182,34%
425314	Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan	1.242.630.000	1.245.405.000,	99,78%
425315	Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan	4.143.345.000	1.503.105.000,	275,65%
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	5.828.051	2.503.366,	
Jumlah		5.770.147.218	2.961.277.116	194,85%

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya meningkat hingga 194% hal ini disebabkan oleh diwajibkannya Jemaah umroh untuk vaksin meningitis dan bertambahnya kerjasama dengan klinik penyelenggara vaksin meningitis.

*Beban
Pegawai
Rp.19.998.650.
417,-*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada semester II Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.19.998.650.417,- dan Rp 17.929.528.370,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Tabel XX. Rincian Beban Pegawai
Semester I TA 2024 dan 2023*

URAIAN		Sem II 2024	Sem II 2023	NAIK (TURUN) %
511111	Beban Gaji Pokok PNS	6.809.891.500,	6.234.365.400,	9154,87%
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	97.327,	-580,	-59,59%
511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	-3.750,	89.089,	-237570,67%
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	442.684.500,	413.809.110,	9347,72%
511122	Beban Tunj. Anak PNS	160.020.768,	146.649.294,	9164,39%
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	34.830.000,	30.510.000,	8759,69%
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	760.135.000,	743.960.000,	9787,21%
511125	Beban Tunj. PPh PNS	69.930.631,	26.073.096,	3728,42%
511126	Beban Tunj. Beras PNS	355.002.840,	358.189.320,	10089,76%
511129	Beban Uang Makan PNS	864.367.000,	813.773.000,	9414,67%
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	53.850.000,	71.225.000,	13226,56%
511611	Beban Gaji Pokok PPPK	234.685.400,	47.649.600,	2030,36%
511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	4.730,	870,	1839,32%
511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	10.200.220,	529.440,	519,05%
511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	267.128,	0,	0,00%
511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	21.120.000,	4.320.000,	2045,45%
511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	8.400.720,	1.448.400,	1724,14%
511628	Beban Uang Makan PPPK	43.803.000,	9.240.000,	2109,44%
512211	Beban Uang Lembur	186.246.000,	139.897.000,	7511,41%
512212	Beban Uang Lembur PPPK	6.894.000,	700.000	1015,38%
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	9.666.815.689,	8.827.792.123	9132,06%
512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	269.407.714,	59.308.208	2201,43%
Jumlah		19.998.650.417	17.929.528.370	12,86%

Beban Pegawai mengalami kenaikan sebesar 12.86%, hal ini disebabkan oleh adanya peralihan pegawai ke fungsional tertentu dari fungsional umum serta kenaikan gaji berkala pegawai.

Beban
 Persediaan
 Rp.3.460.684.
 428,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada semester II Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.3.460.684.428,- dan Rp.3.903.332.215,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan pada semester II Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel XXI. Rincian Beban Persediaan
Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN	Sem II TH 2024	Sem II TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	1.363.342.528	1.215.458.778	12,17%
Beban Persediaan Bahan Baku	-	73.433.801	-100,00%
Beban Persediaan Lainnya	2.097.341.900	2.614.439.636	-19,78%
Jumlah	3.460.684.428	3.903.332.215	-11,34%

Beban Persediaan pada Triwulan III mengalami peningkatan sebesar 5.81% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya belanja persediaan konsumsi dan persediaan lainnya dalam rangka mendukung operasional kantor.

Beban Barang
dan Jasa
Rp.4.942.514.
075,-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada semester II Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.4.942.514.075,- dan Rp.5.096.524.404,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa pada semester II Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel XXII. Rincian Beban Barang dan Jasa

Semester II TA 2024 dan 2023

AKUN	URAIAN JENIS BEBAN	Sem II TH 2024	Sem II TH 2023	Jumlah	NAIK (TURUN) %
521111	Beban Keperluan Perkantoran	434.859.232,	1.099.432.987,	-664.573.755	-60,45%
521115	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	30.000,	280.000,	-250.000	0,00%
521119	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	238.936.000,	218.152.000,	20.784.000	9,53%
521119	Beban Barang Operasiona Lainnya	185.039.000,			
521211	Beban Bahan	881.844.956,	186.184.967,	695.659.989	374%
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	222.360.974,	454.742.384,		
521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	8.723.000,	279.467.260,	-270.744.260	0,00%
522111	Beban Langganan Listrik	520.579.942,	308.957.770,	211.622.172	68,50%
522112	Beban Langganan Telepon	6.222.308,	3.788.059,	2.434.249	64,26%
522113	Beban Langganan Air	8.751.820,	4.557.850,	4.193.970	0,00%
522141	Beban Sewa	397.865.013,	320.939.766,	76.925.247	23,97%
522151	Beban Jasa Profesi	8.000.000,	13.600.000,	-5.600.000	-41,18%
522191	Beban Jasa Lainnya	2.029.301.830,	453.404.457,	1.575.897.373	347,57%
Jumlah		4.942.514.075	3.343.507.500	1.599.006.575	47,82%

Beban Barang dan Jasa mengalami kenaikan sebesar 47.82%, hal ini disebabkan oleh meningkatnya beban langganan listrik dikarenakan naiknya tarif dasar listrik selama periode tahun 2024.

Beban
Pemeliharaan
Rp.1.318.767.
988,-

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan semester II Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.1.318.767.988,- dan Rp.1.464.701.678,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan pada triwulan III tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel XXIII. Rincian Beban Pemeliharaan Semester II TA 2024 dan 2023

AKUN	URAIAN JENIS BEBAN	Sem II.TH 2024	Sem II TH. 2023	Jumlah	NAIK (TURUN) %
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	763.635.081,	773.239.774,	-9.604.693	-1,24%
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	506.186.260,	597.555.989,	-91.369.729	-15,29%
523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,	5.805.300,		
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	44.446.117,	37.804.590,	6.641.527	17,57%
595113	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	4.500.530,	50.296.025,	-45.795.495	-91,05%
Jumlah		1.318.767.988	1.464.701.678	-145.933.690	-9,96%

Beban pemeliharaan selama periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 9.96% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun

sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh menurunnya beban pemeliharaan gedung dan bangunan serta beban persediaan bahan untuk pemeliharaan kantor. Hal ini dikarenakan telah tersedianya beberapa barang pada periode yang lalu.

Beban
Perjalanan
Dinas
Rp.3.190.060.
232,-

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada semester II Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.3.190.060.232,- dan Rp.6.175.913.552,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas Semester II untuk TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel XXIV. Rincian Beban Perjalanan Dinas
Semseter II TA 2024 dan 2023

AKUN	URAIAN JENIS BEBAN	TW III TH 2024	TW III TH 2023	Jumlah	NAIK (TURUN) %
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.205.293.272,	3.270.363.972,		0,00
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.978.407.000,	2.282.095.000,	-303.688.000	-13,31%
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.359.960	409.354.580,	-402.994.620	-98,45%
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	214.100.000,		
Jumlah		3.190.060.232	6.175.913.552	-2.985.853.320	-48,35%

Beban perjalanan dinas mengalami penurunan sebesar 48.35% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya anggaran perjalanan dinas baik dalam kota rangka mendukung pelaksanaan tugas di wilker Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar.

Beban
Penyusutan
dan Amortisasi
Rp.2.682.495.
939,-

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi semester II Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.2.682.495.939,- dan Rp.4.392.412.123,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi triwulan III tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel XXV. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Semester II TA 2024 dan 2023

AKUN	URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	Sem II TH 2024	Sem II 2023	Jumlah	NAIK (TURUN) %
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.204.784.179,	3.912.056.503,	(1.707.272.324)	-43,64%
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	460.554.990,	450.035.050,	10.519.940	2,34%
591313	Beban Penyusutan Jaringan	5.553.300,	10.269.100,	(4.715.800)	-45,92%
592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Kantor	11.603.470,	20.051.470,	(8.448.000)	-42,13%
Jumlah Penyusutan		2.682.495.939	4.392.412.123	(1.709.916.184)	-38,93%

Beban penyusutan dan amortisasi pada semester II mengalami penurunan sebesar 38.93%, hal ini disebabkan oleh berkurangnya asset peralatan dan mesin diakibatkan rusak berat dan tidak dipergunakan lagi dalam operasional kantor serta telah dialihkan menjadi asset lain-lain untuk selanjutnya akan dilakukan lelang penghapusan.

Pendapatan
Dari Penjualan
Peralatan dan
Mesin Rp.0,-

D.8. Pendapatan Dari Penjualan Peralatan dan Mesin

Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin pada tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp.0,-.

Beban
Kerugian

D.9. Beban Kerugian Pelepasan Aset

Beban Penyesuaian Nilai Persediaan pada triwulan III tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Pelepasan

Aset Rp.0,-

Surplus

(Defisit) Dari

Kegiatan Non

perasional

(Rp.0,-)

D.10. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Kegiatan Non Operasional pada sem II TA 2024 dan 2023 mengalami defisit sebesar 0) dan (Rp.164.841.420,-). Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional adalah merupakan selisih dari Pendapatan Non Operasional dengan Beban Non Operasional.

D.11. Surplus/Defisit LO

Surplus/

(Defisit) LO

(Rp.29.823.02

5.861,-)

Pada semester II TA 2024 dan 2023 Balai Besar Kekarantina Kesehatan Makassar mengalami defisit LO, masing-masing sebesar (Rp.29.823.025.861,-) dan (Rp.35.468.559.375,-) adalah merupakan selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO pada semester II tahun 2024.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp.

43.266.495.315,-)

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada semester II Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.43.266.495.315,- dan Rp.44.646.372.621,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan.

Defisit LO

(Rp.29.823.025.861,-)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar (Rp.29.823.025.861,-) dan (Rp.35.468.559.375,-) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.27.234.954.408,- dan Rp.33.962.390.322,- Transaksi antara Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel XXVII. Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas
Semester II TA 2024

AKUN	Transaksi Antar Entitas	TW III 2024	TW III 2023
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	30.222.085.614,	33.141.971.689,
313121	Diterima dari Entitas Lain	-5.770.668.051,	-3.494.194.217,
313221	Transfer Masuk	2.635.569.127,	4.314.612.850,
391133	Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu	147.967.718,	0,
Jumlah		27.234.954.408,	33.962.390.322

E.5.1. Ditagihkan ke Entitas Lain

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode TA 2024 dan 2023, Ditagihkan Ke Entitas Lain sebesar Rp.27.234.954.408,- dan Rp. 33.962.390.322,-.

E.5.2 Diterima Dari Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode semester II TA 2024 dan 2023 sebesar (Rp.5.770.668.051,-) dan (Rp.3.494.194.217,-)

E.5.3. Transfer Masuk

Transfer Masuk merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL

dan antara KL dengan BA-BUN. Rincian Transfer Masuk pada triwulan III TA 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel XXVIII.

Rincian Transfer Masuk Sem II 2024

No	Nama Barang	Satker Pengirim	Kuantitas	Satuan	Harga satuan	Jumlah
1	Vaksin Influenza	SKK Kemenkes	100	Vial	116.900	11.690.000
2	Vaksin Meningitis	SKK Kemenkes	750	Vial	98.600	73.950.000
3	Vaksin Tifoid	SKK Kemenkes	100	Vial	200.000	20.000.000
4	Vaksin Meningitis	BBKK Bandung	200	Vial	95.000	19.000.000
5	Vaksin Yellow Fever	SKK Kemenkes	455	Vial	309.912	141.009.960
6	Buku Sertifikat Vaksin (ICV)	SKK Kemenkes	2000	Buku	10.309	20.618.000
7	Tas Kloter	Puskes Haji	34	Buah	786.768	26.750.112
8	Buku Sertifikat Vaksin (ICV)	SKK Kemenkes	5.000	Buku	102.000	510.000.000
9	Paket Haji	Yanfar	14.501	Paket	68.321	990.722.821
10	ICV	SKK Kemenkes	2.000	Buku	8.030	16.060.000
11	Obat Haji	Yanfar	1	Paket	26.750.112	26.750.112
12	Obat Haji di embarkasi	Yanfar	1	Paket	22.874.934	22.874.934
13	Vaksin Meningitis	BKK Pontianak	300	Vial	124.986	37.495.800
14	Vaksi Meningitis	BBKK Surabaya	400	Vial	122.000	48.800.000
15	ICV	SKK Kemenkes	10.000	Buku	10.900	109.000.000
16	ICV	SKK Kemenkes	6.000	Buku	11.433	68.598.000
17	ICV	BKK Biak	250	Buku	8.030	2.007.500
18	ICV	BKK Manado	500	Buku	10.309	5.154.500
19	ICV	SKK Kemenkes	10.000	Buku	11.433	114.330.000
20	Yellow Fever	SKK Kemenkes	50	Vial	10.309	515.450
21	ICV	BKK Kupang	1.000	Buku	11.433	11.433.000
22	Biologocal Safety Cabinet	SKK Kemenkes	1	unit	68.500.000	68.500.000
23	Centrifuge Mini/Spindown	SKK Kemenkes	1	unit	5.400.000	5.400.000
24	UV Sterilizer	SKK Kemenkes	1	unit	73.750.000	73.750.000
25	Unit Alat Laboratorium Lainnya	SKK Kemenkes	1	unit	175.000.000	175.000.000
26	Refrigerator/Freezer	SKK Kemenkes	1	unit	23.000.000	23.000.000
Total						2.635.569.127

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung pada tahun 2024 sebesar Rp. 147.967.718,- adalah hibah sebidang tanah untuk pembangunan kantor dari Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2023.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Struktur Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar

Struktur organisasi dan tata kerja KKP Kelas I Makassar mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 356/MENKES/PER/IV/2008 tanggal 14 April 2008 Jo Permenkes Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011 tanggal 22 November 2011; Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan. Struktur organisasi KKP Kelas I Makassar terdiri atas :

1. Bagian Tata Usaha terdiri dari dua sub bagian yaitu :
 - a. Sub Bagian Program dan Laporan
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Umum
2. Bidang Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi terdiri dari dua seksi yaitu :
 - a. Seksi Pengendalian Karantina
 - b. Seksi Surveilans Epidemiologi
3. Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan terdiri dari dua seksi Yaitu :
 - a. Seksi Pengendalian Vektor dan Binatang Penular Penyakit
 - b. Seksi Sanitasi dan Dampak Risiko Lingkungan
4. Bidang Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah terdiri dari dua seksi yaitu:
 - a. Seksi Pencegahan dan Pelayanan Kesehatan
 - b. Seksi Kesehatan Matra dan Lintas Wilayah

Pada tahun 2018 salah seorang pejabat struktural telah memasuki masa akhir jabatan yakni Kepala Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan, H. Anas, SKM, M.Kes tepatnya pada tanggal 24 Mei 2018. Posisi sebagai Kabid PRL digantikan sementara oleh Kepala Sub Bagian Program dan Laporan, Yusrianto, SKM selaku Pelaksana Tugas Kepala Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan.

Kepala Seksi Kesehatan Matra dan Lintas Wilayah, dr. Hj. Juniarty Naim mengikuti program tugas belajar pada tahun 2018 di Universitas Hasanuddin Makassar sehingga jabatan beliau digantikan sementara oleh dr. A. Lukman Hakim Amin selaku Pelaksana Tugas Kepala Seksi Kesehatan Matra dan Lintas Wilayah.

Pada tanggal 28 Desember 2017, Kepala Seksi Pengendalian Vektor Dan Binatang Penular Penyakit, Sarli, S.Sos, M.Si dilantik sebagai Kepala Sub Bagian

Tata Usaha di Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Makassar dan digantikan oleh Amran, SKM, M.Kes, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan di BTKLPP Kelas I Makassar. Posisi Kepala Seksi Pengendalian Vektor dan Binatang Penular Penyakit KKP Kelas I Makassar sejak awal tahun 2018 telah ditempati oleh Amran, SKM, M.Kes.

Perubahan jabatan dalam struktur organisasi juga terjadi pada Kepala Seksi Pengendalian Karantina dan Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi, berdasarkan SK Menteri Kesehatan Nomor : KP.03.03/IV/566/2018 tanggal 18 Mei 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kemenkes RI, Kepala Seksi Pengendalian Karantina, Nurdin, SKM dan Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi, Hj. Sukarni, SKM, M.Kes bertukar jabatan.